

HUBUNGAN NU DENGAN PARTAI KEBANGKITAN

BANGSA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU POLITIK ISLAM

DISUSUN OLEH:
M AMIN MUBAROK
NIM: 00370328

PEMBIMBING:

1. Dr. AHMAD YANI ANSORI, M.Ag.
2. Drs. H. ABDUL MAJID, AS.

PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006

ABSTRAK

NU merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang keagamaan dan sosial, mengabdikan tugasnya dengan memberdayakan masyarakat dalam segala bidang. Tapi dalam perjalanannya selalu berubah dengan banyaknya tantangan dalam kehidupan bernegara. NU yang sudah menyatakan keluar dari politik dan akan mengurus organisasi seperti tercantum dalam AD/ART NU bahwa NU kembali kepada khittah.

Setelah menempuh banyaknya pergeseran dalam perjalanannya, dari politik praktis, kemudian khittah dan berpolitik lagi, merupakan suatu hal yang maklum dalam kehidupan karena manusia merupakan makhluk sosial yang akan mencari derajat yang lebih tinggi. Akan tetapi mengapa NU membidani lahirnya sebuah partai politik. Apalagi dalam NU adalah kebanyakan ulama yang mempunyai pesantren, maka dengan masuknya ulama dalam partai politik menjadikan ulama mempunyai peran ganda yang harus dijalankan, satu sisi menjadi pengemban agama dan satu sisi menjadi politikus yang berhadapan dengan agama sebagai dasar kebenaran dan politik yang mengharuskan memisahkan antara kekuasaan untuk kepentingannya dan kepentingan orang lain.

Dengan berdirinya partai politik dari ulama NU baik yang dibidani PBNU, maupun partai yang berdiri karena ketidakpuasan atas keputusan PBNU merupakan perbedaan dalam kancah organisasi yang harus di cegah sebelum menjalar pada lingkup negara yang mempunyai banyak perbedaan, mulai dari agama sampai pada keturunan.

Maka dalam karya ini akan dibahas masalah hubungan antara NU dan PKB, karena NU sudah menyatakan khittah dan memberikan kebebasan penuh kepada warganya untuk masuk dan menyalurkan aspirasi politiknya melalui organisasi politik pilihannya.

Walaupun PKB bukan berasaskan Islam dan PKB mempunyai sifat inklusif, akan tetapi masyarakat sudah menganggap bahwa NU merupakan bagian dari NU oleh sebab itu NU harus bersikap lebih pasti dalam hal sebagai organisasi sosial dan PKB sebagai partai politik yang mempunyai keterkaitan dengan NU.

Banyaknya perbedaan dalam segala urusan menjadikan NU dan PKB tidak pasti dalam urusan politik, dengan sedikit penjabaran masalah diatas dapat dikatakan bahwa NU masih mempunyai hubungan dengan PKB, dengan hubungan tersebut apakah PKB mampu melaksanakan tugas yang di berikan oleh NU yang menitik beratkan pada keadilan dan kemaslahatan umat.

Maka hubungan NU yang bagaimana dan perilaku politik yang bagaimana, karena banyaknya partai politik yang mengharuskan memilih, bukan hanya PKB yang berdiri dari tokoh ulama yang lahir dari NU.

Sehingga dengan hubungan yang di hasilkan dapat menjadikan NU tidak hanya berurusan dengan politik yang akan menghasilkan perpecahan, akan tetapi akan menghasilkan sebuah tatanan yang baik. Jadi bidang dalam politik ada yang menjalankan dan bidang sosial keagamaan juga ada yang menjalankan, supaya tidak selalu berbenturan dalam urusan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dr. AHMAD YANI ANSHORI M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi M Amin Mubarak

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

As-salamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : M Amin Mubarak

NIM : 00370328

Judul : Hubungan NU Dengan Partai Kebangkitan Bangsa Dalam Perspektif Siyasah.

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Was-salamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Jumadil Tsani 1427 H

11 Juli 2006

Pembimbing I



Dr. Ahmad Yani Anshori

NIP : 150276308

Drs. H. ABDUL MAJID AS
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi M Amin Mubarak

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : M Amin Mubarak

NIM : 00370328

Judul : Hubungan NU Dengan Partai Kebangkitan Bangsa Dalam Perspektif Siyasah.

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Jumadil Tsani 1427 H

11 Juli 2006

Pembimbing II



Drs. H. Abdul Majid, AS

NIP : 150192830

PENGESAHAN
Skripsi berjudul

**HUBUNGAN NU DENGAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DALAM
PERSPEKTIF SIYASAH**

Yang disusun oleh:

M AMIN MUBAROK
NIM: 00370328

Telah dimunaqanaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 5 Agustus 2006 M/ 11 Rajab 1427 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Politik Islam.

Yogyakarta 11 Rajab 1427
5 Agustus 2006



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang


Drs. Octoberrinsyah, M.Ag.
NIP: 150 289 435

Sekretaris sidang


Muyassarotusslichah, S.H. M.Hum
NIP: 150 291 023

Pembimbing I


Dr. A.Yani Anshori
NIP: 150 276 308

Pembimbing II


Drs. H.Abdul Majid, AS.
NIP: 150 192 830

Penguji I


Dr. A.Yani Anshori
NIP: 150 276 308

Penguji II


Drs. Octoberrinsyah, M.Ag
NIP:150 289 435

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Sebagai fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Di bawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	s	es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	H	ha (titik dibawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	zet (titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	es (titik bawah)

ض	Dad	d.	de (titik bawah)
ط	ta'	T	te (titik dibawah)
ظ	za'	z.	zet (titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha.	H	H
ء	hamzah	,	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkaf (diftong).

1. Vokal Tunggal

Transliterasi vokal tunggal bahasa Arab, yang dilambangkan dengan tanda atau harokat, adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	fathah	a	a
ِ	kasrah	i	i
ُ	dammah	u	u

Contoh :

سُئِلَ - su'ila ذُكِرَ - zukira

2. Vokal Rangkap

Tranliterasi vokal rangkap bahasa Arab, yang dilambangkan dengan gabungan antara harakat dan huruf, berupa gabungab huruf.

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ ي	fathah dan ya	ai	a dan i
َ و	fathah dan wawu	au	a dan u

contoh :

كَيْفَ : kaifa حَوْلَ : haula

أَيْسَرَ : aisara قَوْلَ : qaula

C. Maddah

Transliterasi maddah atau vokal panjang, yang dilambangkan berupa huruf dan harakat, burupa hurif dan tanda

Tanda	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ي ا	fathah dan alif atau alif	a	a dengan garis di atas
ي	kasrah dan ya	i	i dengan garis di atas
و	dammah dan wawu	u	u dengan geris di atas

Contoh :

قَالَ سُبْحَانَكَ : qalā subḥānaka فِيهَا مَنَافِعُ : fīhā manāfi'u
رَمَى : ramā إِذْ قَالَ يُوسُفُ : izqalā yusufu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua :

1. Ta Marbutah hidup. Transliterasi ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, adalah /t/
2. Ta' Marbutah mati. Transliterasi ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat msukun, transliterasinya adalah /h/

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfal
طَلْحَةَ : talḥah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan ni dilambangkan dengan tanda, yaitu tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

رَبَّنَا : rabbana ذُكِّرَ : zukkira

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistim tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang di ikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu /I/ diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu

Contoh :

التَّوَابُ : at- tawwābu الشَّمْسُ : asy-syamsu

2. Kata sandang yang di ikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh :

الْأَمِينُ : al-amīnu الْفَقْرُ : al-faqrū

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya diberi tanda hubung (-).

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ : ta'khuzūna الشُّهُدَاءُ : asy-syuhā'u

السَّمَاءُ : as-sama'u

أُمِرْتُ : umirtu

H. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), *ism* atau *harf*, ditulis terpisah. Ada kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - wa inna Allāha lahuwa khair ar-raziqin

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - man istata'ā ilaihi sabi'ān

1. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Huruf kapital, seperti yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah awal huruf nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : Wama Muhammadun illa rasulun

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ : Walaqad ra'ahu bi al-ufuq al-mubini

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : Al-Hamdu li Allāhi rabbi al-'ālamina

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dihilangkan. Contoh :

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - nasrūn minallaḥi wa fahun qarīb

لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - lillaḥi al-amru jami'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - Wallaḥu bi kulli syain 'alīm

J. Tadwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pada musyawarah kerja Ulama Al-qur'an ahun 1987/1988 dan tahun 1988/1989 telah dirumuskan konsep pedoman praktis tajwid Al-qur'an sebagai kelegkapan pedoman Tranliterasi Arab-Latin ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO HIDUP

"من لم يقم بأداء واجبه نحو وطنه ودينه حذرا من التعب والموت فليس باهل

لان يعيش لأن الموت آت لا بد منه ولكن النفس الشريفة لاتموت"

Barang siapa tidak menunaikan kewajibanya terhadap negara dan agamanya karena takut payah dan takut mati, maka ia tidak berhak untuk hidup, sebab kematian adalah sesuatu yang pasti akan datang, namun jiwa yang mulia tidak akan pernah mati.....Syair Arab.¹

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Anang Rikza Masyhadi, *Hadis-Hadis Politik*, (Yogyakarta: IKAPI, 2005).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاة
والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه
اجمعين.

Segala puji hanya milik Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karunia yang selalu dilimpahkan kepada seluruh hamba-nya. Khususnya kepada penulis, sehingga dengan ridlonya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. tauladan umat manusia di bumi.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini hingga selesai, khususnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madani, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dalam pembuatan skripsi ini.
3. Bapak Drs. H. Abdul Majid, AS selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Makhrus Munajat, M.Hum, Bapak Drs. Octoberrinsyah, M.Ag, selaku ketua dan sekretaris jurusan Jinayah Siyasah, Bapak Drs. Oman Fathurrahman selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan selama menempuh studi di UIN, beserta segenap dosen dan karyawan/karyawati fakultas Syari'ah yang telah membantu dengan memperlancar proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak K.H.R. Muhammad Najib AQ selaku pengasuh Madrasah Huffad PP Al- Munawir yang membimbing penulis dalam mempelajari Al-Qur'an.
6. Bapak H. Mukmin dan Ibu Siti Maruwah selaku orang tua penulis, dengan kasih sayang dan sabarnya telah membesarkan dan mendidik penulis, serta kakakku, mbak yati, kang roji, kang mucharom, adiku mustaghfirin dan nenek yang memberikan semangat untuk terus berusaha.
7. Saudara-saudaraku IMAFTA, pak geng, sbr, aripin, faizin, jazin, didin dan para relawan IMAFTA yang belum kusebut, yang selalu memberikan informasi-informasinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Rekan-rekanku, gus bisri, gus bawe, gus jegog, gus kentung, gus ichul yang memberikan hiburannya, dan semua santri PP Al-Munawwir terutama temanku Madrasah Huffadh yang telah memberikan semangat.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis, yang tidak dapat di sebutkan penulis satu persatu di sini.

Terakhir, penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun berkaitan dengan skripsi ini.

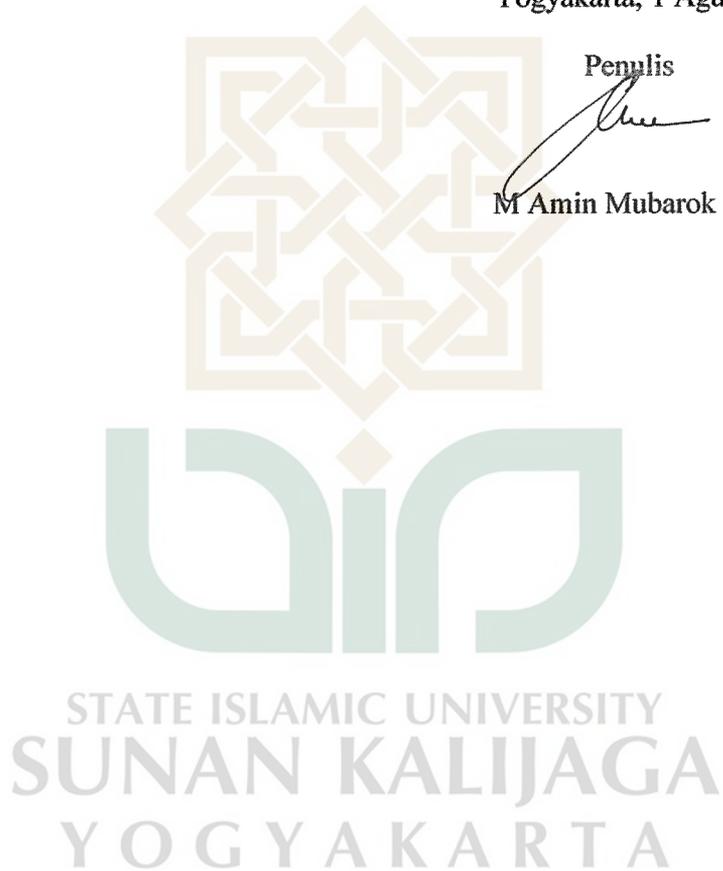
Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya serta memberikan balasan kebaikan kepada kita semua. *Wa Allah al-muwafiq ila aqwam al-tariq.*

Yogyakarta, 1 Agustus 2006

Penulis



M Amin Mubarak



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAKSI	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO HIDUP	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	13

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NU DAN PKB

A. Latar Belakang Lahirnya NU	15
B. NU dan Politik	22
C. Latar Belakang Berdirinya PKB	34
D. Garis Perjuangan PKB	37
 BAB III HUBUNGAN NU DENGAN PKB	
A. NU Sebagai Organisasi Sosial Keagamaan	45
B. PKB Sebagai Partai Politik	49
C. Relasi Antara NU dengan PKB	54
 BAB IV ANALISIS TERHADAP HUBUNGAN NU DENGAN PKB DALAM PERSPEKTIF SIYASAH	
A. Analisis Terhadap Hubungan NU dengan PKB dalam Perspektif Siyasah	57
B. Analisis Terhadap Realitas Hubungan NU Dengan PKB	63
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Saran saran.....	67
 DAFTAR PUSTAKA	69
 LAMPIRAN-LAMPIRAN :	
1.TERJEMAHAN	I



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA III

3. ANGGARAN DASAR NU

4. CURICULUM VITAE IX



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konstalasi perjalanan politik nasional, keberadaan gerakan keagamaan memiliki andil tidak kecil. Hal ini teramati berbagai aktifitas yang di tampilkan sebagai upaya menjawab dan mengantisipasi kebutuhan bangsa. Fenomena ini tampak jelas dan mencolok sebab banyaknya problem sosial politik yang menimpa bangsa.

Menurut Aristoteles, sebagai mana dikutip Ramlan Surbakti, politik merupakan perkara yang melekat pada lingkungan hidup manusia dalam kesehariannya karena itulah ilmu politik disebut sebagai *Master of Science*.¹

Nahdlatul Ulama, jauh sebelum lahir sebagai organisasi, telah ada dalam bentuk komunitas (jamaah) yang diikat oleh aktifitas sosial keagamaan yang mempunyai karakter ahlussunah wal jamaah, wujudnya sebagai organisasi tak lain adalah penegasan formal dari mekanisme informal para ulama sepaham. Arti penting di bentuknya organisasi ini tidak lepas dari konteks waktu itu terutama berkaitan dengan pemberdayaan umat disegala bidang terutama di bidang keagamaan, serta menjaga eksistensi jamiyahnya.²

Sebagai organisasi yang konsern dengan perjuangan yang sifatnya kultural keagamaan dan pemberdayaan terhadap rakyat, NU mempunyai beban moral yang

¹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, cet-1, (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 1.

² Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, (Sala: Jatayu, 1985), *Kebangkitan Umat Islam dan Peranan NU di Indonesia*, (Surabaya: PCNU Kodya Surabaya, 1980), hlm. 90.

besar, selain menjaga agar NU tidak keluar dari jalur aslinya, dan juga tugas utama dari organisasi ini adalah menyiarkan agama islam agar dikenal dan diterima oleh masyarakat luas.

NU pada akhirnya tidak hanya bergerak dalam bidang sosial keagamaan dan perjuangan kultural saja. NU telah menjelma menjadi partai politik yang merupakan indikator bahwa NU tidak hanya berjuang dalam datran kultural akan tetapi telah terjun kedalam urusan politik praktis. NU terlibat politik secara organisatoris dinyatakan pada muktamar ke-19 di Palembang tahun 1952, NU menyatakan keluar dari masyumi dan menegaskan dirinya sebagai partai politik. Pada pemilu 1955 NU menduduki urutan ketiga setelah partai PNI dan Masyumi. Hal ini membuktikan bahwa NU mempunyai basis masa yang cukup banyak dan harus dipertimbangkan oleh kekuatan-kekuatan politik lain.³

Perubahan dan pergeseran politik NU ini tidak terlepas dari dimensi kepentingan ideologis dan politis, yakni kepentingan mempertahankan dan mengembangkan paham ahlussunah wal jamaah dan kepentingan memperoleh kekuasaan politik dalam pemerintah.⁴

Sejarah yang kelam memang mewarnai perjalanan politik NU, oleh sebab itu NU sebagai lembaga dan organisasi yang sebenarnya mempunyai garis perjuangan dalam bidang ubudiyah kemudian menarik diri dari kancah perpolitikan nasional. Tepatnya pada muktamar ke-27 tahun 1984 di Situbondo, membuat keputusan yaitu kembali ke khittah 1926, NU tidak lagi menerjuni

³ Bahrul Ulum, *Bodohnya NU Apa NU Dibodohi?*, (Semarang: Ar-Ruzz, September, 2002), hlm. 71.

⁴ Rozikin Daman, *Membidik NU*, (Gama Media: April, 2001), hlm. 93-94.

politik praktis dan kemudian lebih menekankan pada perjuangan kemaslahatan umat.⁵

Keputusan kembali ke khittah memang membuat warga NU tidak bisa berpolitik secara organisatoris, namun kebebasan para politisi, ulama dan pimpinan NU untuk berafiliasi dengan berbagai partai yang ada tidak mungkin bisa dibendung.⁶

Nahdlatul Ulama selama ini dikenal sebagai organisasi keagamaan tradisional yang unik. Dalam perjalanan sejarahnya hingga kini telah melalui beberapa fase dengan penampilan yang berbeda-beda. Fase awal NU bercorak gerakan keagamaan, fase kedua NU dengan gerakan politik praktisnya, dan fase ketiga (pasca khittah) NU terbawa arus kearah deparpolisasi atau depolitisasi formal dengan gerakan politik kulturalnya yang dimainkan oleh generasi pembaharu dengan dukungan kharisma pada ulamanya.⁷

Pada orde reformasi NU sebagai organisasi keagamaan yang mempunyai masa terbesar di Indonesia kembali terjun dalam politik. Hal ini dikarenakan NU sebagai kekuatan besar tidak pernah dilibatkan oleh para aktor negara pada masa orde baru dan malah selalu di pinggirkan. Karena desakan yang begitu hebat dari warga NU untuk mendirikan sebuah rumah politik, akhirnya PBNU membuat

⁵ Bahrul Ulum, hlm. 92-95.

⁶ Marzuki Wahid dkk (ed dan pen), *Geger di Republik NU, Perebutan Wacana, Tafsir Sejarah, Tafsir Makna*, (Jakarta: Lakpesdam, 1999).

⁷ Rozikin Daman, *Membidik NU, Dilema Politik Percaturan NU Pasca Khittah*, (Yogyakarta: Gama Media, 2000), hlm. 34.

keputusan dengan mendirikan partai yang diberi nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).⁸

Kelahiran partai ini tidak berjalan mulus, karena masih ada kritikan dan gembosan dari ulama NU yang tidak sepakat dengan keputusan PBNU, karena menurutnya NU sudah menyatakan khittah. Oleh karena itu, NU harus konsern dengan perjuangan keagamaan dan sosial, tidak boleh terjun dalam politik praktis. Ulama yang tidak sepakat dengan keputusan PBNU, kemudian mendirikan partai sendiri. Diantara partai yang didirikan atas dasar ketidak puasan keputusan PBNU tersebut adalah PNU dan PKU.

Walaupun berdirinya PKB dibidani oleh PBNU, akan tetapi sebenarnya ada garis demarkasi yang jelas antara NU dan PKB. Secara kultural NU dan PKB memang berkaitan erat akan tetapi secara organisatoris PKB adalah jamiyah siyarah yang bersifat otonom dan tidak ada kaitanya dengan NU.⁹

Dengan adanya partai baru ini, maka ulama mempunyai tugas ganda, tugas pertama adalah sebagai pemimpin spiritual agama dan yang kedua adalah pemimpin politik, karena tidak mungkin sebuah partai yang didirikannya tidak memberikan kontribusi kepadanya. Memang secara essensial antara agama dan politik saling berhubungan. Hubungan agama dan politik disini adalah bagaimana politik itu mendasarkan pada nilai-nilai keadilan, kebenaran dan menjunjung moralitas dalam berpolitik. Akan tetapi dalam realitasnya, politik sekarang ini cenderung menggunakan teori Machiaveli yang menghalalkan segala cara untuk

⁸ Bahrul Ulum, hlm. 134-135.

⁹ Muhammad Muzammil, *NU, PKB dan Khittah 1926*, (Kompas: 27 September, 1999).

mendapatkan kekuasaan, oleh sebab itu muncul asumsi bahwa *politic is the dirty game*.¹⁰

Menurut hemat penyusun, PKB yang dimotori oleh ulama harus mempunyai hubungan politik yang dapat memotori terjadinya politik islam yang benar dan berlandaskan politik islam secara essensial, karena politik islam harus dijiwai oleh ruh agama islam yang selalu memperjuangkan nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kejujuran dalam segala hal secara umm.

Fenomena ini menarik untuk penyusun kaji, karena menurut penyusun NJ yang sudah mengambil sikap untuk kembali mengawal perjuangan kultural yang sesuai dengan AD/ART organisasi sosial keagamaan NU, tidak lagi menyusuri pada politik praktis yang berorientasi pada kekuasaan belaka, selain itu NU juga memberikan kebebasan kepada para nahdhiyyin untuk menggunakan hak pilih sesuai dengan pilihan hati nuraninya.

Kejadian ini sangat bertentangan dengan makna khittah, yang seharusnya NU netral dalam politik dan membangun hubungan yang baik dengan partai politik lain supaya dapat mewujudkan pemimpin yang benar-benar mementingkan kepentingan negara dari pada kepentingan dirinya sendiri. Tapi mengapa NU malah terjerumus pada kepentingan politiknya sendiri yaitu antra organisasi dan partai.

Dengan demikian, NU harus memprioritaskan dan memberi perhatian yang cukup pada pengembangan wawasan keagamaan, sejalan dengan perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, pembaharuan

¹⁰ A.F.K. Organski, Tahap-Tahap Perkembangan Politik, (Jakarta: Akademika, Mei 1985), hlm. 42.

pemikiran agama (tajdid) bagi NU merupakan suatu keharusan tanpa meninggalkan tradisi pemikiran ahlussunah wal jamaah.

Maka NU sebagai suatu gerakan lembaga swadaya masyarakat yang memilih gerakan kultural, dengan watak moderat, terbuka dengan modernisasi, tanpa meninggalkan tradisi, sesuai dengan tradisi pemikiran yang di anut berdasarkan doktrin.

المحافظة على القديم الصالح والخذ بالجد بالاصلاح¹¹

Akhirnya semoga penelitian ini bisa menghasilkan karya yang ikut menegakkan identitas islam dan menambah wawasan tentang politik dalam negeri.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penyusun dapat merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk hubungan NU dengan Partai Kebangkitan Bangsa?
2. Bagaimana Realisasi hubungan NU dengan Partai Kebangkitan Bangsa?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Penelitian ini bertujuan:
 - a. Mendiskripsikan hubungan NU dengan PKB.
 - b. Mendeskripsikan realisasi hubungan NU dengan PKB
2. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

¹¹ Marzuku Wahid dkk, hlm. 105.

- a. Dapat dijadikan referensi dan sebagai sumbangan bagi penelitian selanjutnya, serta untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang fiqh siyasah.
- b. Menambah wawasan tentang politik Islam, terutama dalam praktek berpolitik dan menjalankannya dalam kehidupan.

D. Telaah Pustaka

Dari sepengetahuan penyusun, kajian tentang NU sebenarnya sudah cukup banyak, akan tetapi penyusun belum menemukan yang secara khusus mengkaji tentang judul dan pokok permasalahan seperti yang penyusun tulis dalam karya ini. Namun dengan kemampuan yang penyusun miliki, penyusun mencoba menelaah dari beberapa literatur yang ada, sehingga nantinya akan memperjelas bahwa masalah tersebut layak untuk diteliti lebih lanjut. Tulisan ini diharapkan akan bisa memberikan gambaran dan penjelasan yang lebih tentang permasalahan yang penyusun kaji.

Beberapa literatur yang penyusun pelajari, pembahasan tentang NU, lebih banyak mengutarakan sebagai jamaah yang berhubungan dengan politik, sedangkan dengan partai politik masih sedikit. Untuk mengetahui sejauh mana masalah tersebut sudah dibahas dalam literatur, maka akan ditelusuri suatu pustaka sehingga dari sini dapat diketahui apakah masalah tersebut masih perlu dibahas dalam karya ilmiah.

Diantara kajian tentang NU adalah : Syafi'i Maarif, membahas sikap NU, kajian ini membahas ketika NU berpolitik pada masa orde baru, tetapi dalam

hubungan antar partai terutama PKB masih sedikit dibahas.¹² Dalam bukunya Marzuku Wahid, yang membahas tentang keguncangan atau problem dalam organisasi NU, ketika NU menentukan sikap politiknya dan bahasan ini lebih banyak berupa esai.¹³

Buku Bodohnya NU Apa NU Dibodohi? Ini menjelaskan hubungan antara ulama dengan organisasi NU sebagai payung kyai dalam berpolitik di era reformasi dan hanya menjelaskan tentang bagaimana NU sebagai partai politik yang terjun dalam politik praktis baik di era orde lama, orde baru, maupun pada saat reformasi.¹⁴

Ada juga kajian ilmiah yang membahas tentang NU diantaranya: Ulama dan politik: Studi tentang P.P. Al Munawwir dalam kampanye PKB pada pemilu 1999 di Yogyakarta, ini hanya khusus membahas tentang ulama dalam PKB yang berhubungan dengan kampanye pada awal berdirinya PKB.¹⁵ Peran politisi NU di tengah krisis multi dimensional, ini menguraikan tentang peran Abdurrahman Wahid sebagai presiden RI dalam membawa agenda reformasi, dan menjalankan konsistensi pribimisasi nilai-nilai keislaman, belum membahas keterkaitan yang di maksud penyusun dalam karya ini.¹⁶ Pemikiran K.H. Achmad Siddiq, tentang ukhuwah dan pengaruhnya terhadap wacana perilaku politik NU 1984-1990, ini

¹² Rozikin Daman, *Membidik NU*, (Yogyakarta: Gama Media: April, 2001).

¹³ Marzuki Wahid dkk, *Geger di Republik NU*, (Lakpesdam: Jakarta, 1999).

¹⁴ Bahrul Ulum, *Bodohnya NU Apa NU Dibodohi?*, (Semarang: Ar-Ruz, September 2002).

¹⁵ Suharni, "Ulama dan Politik", *Studi: Peran Ulama P.P. Al Munawwir Dalam Kampanye PKB Pada Pemilu 1999 di Yogyakarta*, Skripsi.

¹⁶ Khoirul Anam, *Peran Politisi Kyai NU di Tengah Krisis Multi Dimensional*, Skripsi.

menguraikan tentang pentingnya ukhuwah dalam politik NU agar terhindar dari perpecahan, yang bisa mengakibatkan paham egois.¹⁷

Dari pemaparan telaah pustaka yang penyusun uraikan diatas belum ada satu buku maupun literatur yang mengkaji sebagaimana yang penyusun bahas. Oleh sebab itu menurut hemat penyusun permasalahan yang penyusun ajukan layak untuk dikaji.

E. Kerangka Teoritik

Dari masalah yang telah dikemukakan diatas menunjukkan bahwa NU sebagai lembaga sosial keagamaan keluar dari jalur politik dikarenakan sebab NU ingin kembali kepada perjuangan kultural dengan menitik beratkan pada pemberdayaan terhadap umat disegala bidang terutama dibidang keagamaan.

Akan tetapi mengapa pada era reformasi NU dan para pendukung setianya kembali ke jalur politik praktis yang dalam sejarahnya tidak dapat memberikan perubahan pada pengikutnya, padahal seharusnya NU tidak lagi terjun dalam politik praktis. Karena NU sudah menyatakan khittah dan politik praktis hanya akan membuat NU tidak konsern dalam permasalahan agama dan sosial kemasyarakatan yang mengakibatkan perpecahan ditingkat organisasi ini, serta hanya akan menjadi alat oleh segelintir orang yang haus dengan kekuasaan jabatan dalam pemerintah.

Maka konsekuensi dari penerimaan khittah, telah lahir budaya (kultural), suatu gerakan yang berusaha menumbuhkan dan mengembangkan pemikiran, wawasan, pandangan, persepsi dan penilaian atas masalah-masalah yang dihadapi

¹⁷ Faizal, *Pemikiran K.H. Achmad Siddiq, Tentang Ukhuwah dan Pengaruhnya Terhadap Wacana Perilaku Politik NU 1984-1990*, Skripsi.

bangsa Indonesia pada umumnya dan komunitas NU pada khususnya. Namun dalam kenyataan, orientasi gerakan politik kultural NU dalam implementasinya secara internal masih harus berhadapan dengan orientasi politik dari politisi NU yang masih cukup kuat, baik dalam hubungannya dengan PKB, maupun ketika berhadapan dengan otoritas kekuasaan.¹⁸

Seharusnya masalah ini yang harus di garap oleh NU yang mempunyai agenda untuk memberdayakan umat dalam segala bidang, bukan pada sebuah agenda kemenangan sebuah partai yang merasa didirikan harus menang dalam sebuah pemilihan umum, kita ketahui bersama bahwa politik adalah ranah yang rentan dan rawan dengan godaan kekuasaan yang pada akhirnya dapat menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan dan kekayaan.

Sebagai mana pendapat Ward, bahwa perilaku NU sebagai organisasi sosial keagamaan terjun kedalam politik praktis secara umum digambarkan sebagai “oportunistik” atau “akomodatif”. Hal ini menunjukkan bahwa politik praktis yang diperankan oleh NU sebagai lembaga tidak dapat memperjuangkan hak-hak rakyat yang selama ini di tindas oleh penguasa.¹⁹

Maka demi menjaga eksistensi jamaah NU, peran NU harus diarahkan pada penciptaan “konsensus nasional” dengan meletakkan perjuangan NU pada konteks demokrasi jangka panjang, jelasnya menciptakan ideologi kultural, dan mengembangkan masyarakat dari bawah. Konsensus dari pandangan ini, maka

¹⁸ Rozikin Daman, *Membidik NU, Dilema Percaturan NU Pasca khittah NU*, (Yogyakarta: Gama Media, 2000), hlm. 182.

¹⁹ Andree Felliard, *Gus Dur dan Masyarakat Sipil*, (Jogjakarta: Lkis, November 1994), hlm. 2.

partisipasi NU bukan dalam kaitan primordial-patrokial, akan tetapi pada bentuk fungsional, sasaran yang dipergunakan bukan lagi penguasaan terhadap lembaga politik, melainkan mampu menyalurkan aspirasi islam yang berupa nilai-nilai universal.²⁰

Dalam ajaran islam penataan pengaturan kehidupan publik dimaksudkan untuk menciptakan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan hukum dan etika sosial.²¹ Dari tatanan ini kemudian di cita-citakan kemaslahatan hidup bernegara, kesejahteraan sosial secara umum dapat terwujud. Secara ekplisit islam mengajarkan pada manusia untuk menegakkan keadilan,²² kebebasan,²³ persamaan hak dan kewajiban,²⁴ dan bermusyawarah dalam kehidupan bersama.

Sebagaimana dalam Al Qur'an di sebutkan,

وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله²⁵

F. Metode Penelitian

Studi ini merupakan studi pustaka (*librari research*) yaitu sebuah kajian yang menjadikan bahan-bahan pustaka sebagai sumber data sehingga lebih bersifat penelitian dokumenter. Disamping itu penelitian ini masuk dalam kategori historis-faktual, karena yang dijadikan penelitian adalah perilaku politik NU yang

²⁰ Pudjo Sularso, *Elit NU dan Kemauan Depolitisasi*, dalam S. Sanansari Ecip (ed), *NU, Khittah dan godaan politik*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 15.

²¹ Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Qur'an*, alih bahasa Anas mahyudin, cet ke-2, (Bandung: Pustaka, 1996), hlm 54.

²² Al Maidah (5): 8.

²³ Al Baqoroh (2): 256.

²⁴ Al Hujurat (49): 13.

²⁵ Ali Imran (3): 159.

terus berubah. Bisa juga dikatakan deskriptif, karena penelitian ini berusaha untuk menggambarkan perjalanan politik NU, menguraikan, kemudian menyertakan pula interpretasinya.

Langkah yang di tempuh dalam penelitian ini dapat di tunjukkan dalam beberapa poin:

1. Pengumpulan data

Dalam penelitian pustaka, pengumpulan data yang di maksud ialah data kualitatif (data yang di sajikan dalam bentuk verbal) atau data-data yang relevan dengan yang dikaji, yang diperoleh dari tafsir, hadis, fiqih, jurnal, buku atau karya ilmiah.

2. Analisis data

Data-data yang telah terhimpun, baik dari literatur, dokumen-dokumen yang ada relevansinya dengan skripsi ini, akan di analisis secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis sebagai berikut:

- a. Deduktif: mengemukakan teori-teori, dalil-dalil, kaidah-kaidah yang bersifat umum, kemudian di akhiri dengan kesimpulan yang sifatnya khusus.
- b. Induktif: yakni pengambilan kesimpulan di mulai dari fakta-fakta khusus, menuju kesimpulan umum.

2. Metode Pendekatan

Untuk penelitian ini, karena meliputi kehidupan sosial dan politik dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang penuh dengan kepentingan

bersama, maka penyusun mencoba untuk menggunakan metode pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan historis-sosiologis

Pendekatan ini di gunakan agar dapat menelusuri sejarah, serta konteks politik yang mempengaruhinya sehingga akan tampak karakteristiknya.

b. Pendekatan hermeneutika sosial

Pendekatan ini merupakan interpretasi terhadap perilaku politik NU.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran dan penjelasan pembahasan secara sistematis, penyusun membuat sistematika penyusunan skripsi sebagai berikut: pendahuluan, isi dan penutup. Pendahuluan terletak pada bab pertama, isi terletak pada bab kedua, dan ketiga, bab keempat analisis dari masalah yang telah dikaji, sedang penutup ditempatkan pada bab kelima.

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas, tinjauan umum tentang Nahdlatul Ulama dan Partai Kebangkitan Bangsa. Pada bab ini ada sub bab yang menjelaskan latar belakang dan sejarah berdirinya NU, NU dan politik dalam kancah perpolitikan nasional, serta sejarah lahirnya PKB dan garis perjuangannya.

Bab ketiga, berisi tentang hubungan NU dan PKB, menjelaskan tentang NU sebagai jamiyah diniyah dan PKB sebagai partai politik, serta relasi antara keduanya.

Bab Keempat, berisi analisis terhadap hubungan NU dengan PKB dalam perspektif siyasah, dan analisis terhadap realisasi hubungan NU dengan PKB.

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran-saran untuk menyempurnakan kembali dari hasil penelitian ini dan mengembangkan penelitian keilmuan dalam disiplin ilmu politik islam.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian terdahulu dapat disimpulkan bahwa:

1. NU secara organisatoris tidak mempunyai hubungan dengan PKB, NU hanya mempunyai hubungan secara historis atas kelahiran PKB dan hubungan itu hanya bersifat emosional.
2. Dalam realitas yang dijalankan NU berbeda dengan apa yang menjadi pedomannya, karena NU masih bersinggungan dengan politik terutama dengan PKB.

B. Saran

Dengan pembahasan yang telah disampaikan terdahulu, penyusun menilai masih banyak campur tangan NU kepada PKB. Oleh sebab itu penyusun menyarankan:

1. Hendaknya NU tidak terjebak pada kepentingannya untuk duduk dalam pemerintahan, karena akan merugikan NU sebagai organisasi.
2. Penyusun menghimbau agar NU tidak bersinggungan dengan PKB terlalu lama, yang bisa mengakibatkan NU terjerumus dalam politik praktis dan akan mengulang memori masa lalu yang tidak bisa dilupakan.
3. PKB hendaknya harus benar-benar menjadi partai terbuka dengan seluas-luasnya, bukan hanya mencari dukungan dari NU dan warganya, jika ingin menjadi partai yang lebih solid dalam percaturan politik.

4. Dalam menghadapi perjalanan politik selanjutnya, maka NU seharusnya lebih netral dalam politik, sehingga NU akan steril dari berbagai macam godaan kekuasaan dan NU tidak ditinggalkan oleh pengikutnya. Sedangkan PKB harus tidak membawa nama NU dalam politiknya, sehingga PKB mampu menjadi partai yang berdiri sendiri tanpa campur tangan NU.

Dengan selesainya hasil penelitian ini, bukan berarti selesai pula perburuan mencari ilmu. Oleh sebab itu dengan kerendahan hati, penyusun mengharapkan penelitian ini dikembangkan dan dikaji ulang sebab permasalahan politik akan berubah secara dinamis dan terus berkembang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al Qur'an

Al Qur'an dan terjemahan.

B. Kelompok Hadis

Al-Bukhori, Muhammad bin Ismail, *Shohih al-Bukhori*, 8 jilid, (Beirut: Dar al-Fikr 1981 M/1400 H).

Dawud, Sidqi Muhammad Jamil, *Sunan Abi Dawud*, 2 jilid, (Beirut: Dar al-Fikr 1994 M/1414 H).

Muslim, Imam, *Arba'in An-Nawawiyah*, (Semarang: Toha Putra, 1987).

C. Kelompok Buku

Adnan, Abdul Basith, *Kemelut di NU*, (Solo: Mayasari, 1982).

Amin, Masyhur, *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraanya*, (Yogyakarta: Al-Amin Press, 1995).

Anam, Khoirul, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, (Sala: Jatayu, 1985).

_____, *Kebangkitan Islam dan Peranan NU di Indonesia*, (Surabaya: PCNU Kodya Surabaya, 1980).

Bekker, Anton, *Metode-metode filsafat*, (Jakarta, Ghalia Indah, 1984).

Bruinessen, Martin Van, *NU Tradisi, Relasi-relasi Pencarian Wacana Baru*, (Yogyakarta: Lkis, 1994).

Daman, Rozikin, *Membidik NU, Dilema Politik Percaturan NU Pasca Khittah*, (Yogyakarta: Gama Media, 2000).

Danunjaya, Budiarto, *Hari-hari Indonesia Gus Dur*, (Yogyakarta: Galang Press, 2001).

Effendi, Bahtiar, *Islam dan Negara*, (Jakarta: Paramadina, 1998).

Ellyasa, *Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil*, (Yogyakarta: LkiS, 1997).

Fathoni, Khoirul, *NU Pasca Khittah*, (Yogyakarta: Media Widya Mandala, 1992).

Felliard, Andree, *Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil*, Jogjakarta: Lkis, 1997.

- _____, *NU Vis a Vis Negara*, Yogyakarta: LkiS, 1999.
- Gaffan, Affar, *Berpolitik Untuk Agama Misi Islam, Kristen dan Yahudi Tentang Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).
- Gibb, *Muhammaddenism*, alih bahasa Abussalam, (Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1983).
- Haidar, Ali, *Reformasi Prematur, Jawaban Islam Terhadap Reformasi Total*, (Jakarta: Darul Falah, 1998).
- _____, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia, Pendekatan Fiqh Dalam Politik*, cet-1, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998).
- Hairussalim, *Tujuh Mesin Pendulang Suara*, (Yogyakarta: LkiS, 1999).
- Ida, Laode, *Anatomi Konflik: NU Elit Islam dan Negara*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1996).
- Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LkiS-Pustaka Pelajar, 1994).
- Madjid, Nurkholis, *Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam dan Masalah Intregasi Umat*, (Jakarta: Islamic Research Center, 1970).
- Masyhadi, Anang Rikza, *Hadis-hadis Politik, Aktualisasi Sunnah Dalam Kehidupan Sosial dan Politik*, cet-1 (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005).
- Muzadi, Hasyim, *NU di Tengah Agenda Persoalan Bangsa*, (Jakarta: Logos, 1999).
- Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet-2, (yogyakarta, Rake Surasin, 1990).
- Nahriwi, Imam, *Moralitas Politik PKB*, (Malang: Averroes Press, 2005).
- Organski, *Tahap-tahap Perkembangan Politik*, (Jakarta: Akademika, 1985).
- Rahman, Fazlur, *Tema pokok Al Qur'an*, alih bahasa anas Mahyudin, cet. 2 (Bandung, Pustaka; 1996).
- Ramlan, Surbakti, *Memahami Politik*, cet-1, (Jakarta: Gramedia, 1992).
- Sularso, Pudjo, *Elit NU dan Kemauan Depolitisasi*, dalam S. Sanansari Ecip (ed), *NU, Khittah dan Godaan Politik*, (Bandung: Mizan, 1994).

Ulum, Bahrul, *Bodohnya NU Apa NU Dibodohi*, (Semarang: Ar-Ruzz Press, 2002).

Wahid, Marzuki, *Dinamika NU, Perjalanan Sosial Cipasung ke Kediri 1994-1999*, (Jakarta: Lakpesdam-Kompas, 1999).

_____, *Geger di Republik NU, Perebutan Wacana Tafsir Sejarah, Tafsir Sejarah, Tafsir Makna*, (Jakarta: Lakpesdam, 1999).

Zuhri, Saefuddin, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangan di Indonesia*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981).

D. Kelompok Karya Ilmiah dan Artikel

Abdillah, Masykuri, *Ulama dan Politik*, (Jakarta: Kompas, 17 April 1999).

_____, *Agama dan Pluralitas Masyarakat Bangsa*, (Jakarta: Kompas, 25 Februari 2000).

Anam, Khoirul, *Peran Politik Kyai NU di Tengah Krisis Multi Dimensional*, Skripsi.

Alfian, Alfian, *Memahami Polarisasi Politik Ulama*, (Jakarta: Kompas, 25 Agustus 1999).

Faizal, *Pemikiran K.H. Achmad Siddiq, Tentang Ukhuwah dan Pengaruhnya Terhadap Wacana Perilaku Politik NU 1984-1990*, skripsi.

Majalah Pesantren, *"Pesantren dan Pendidikan Politik"*, (Jakarta: Edisi VII/2002).

Muzadi, Hasyim, *Menggagas Kebangkitan NU Kedua*, (Jakarta: Kompas, 9 November 1999).

Muzammil, Muhammad, *NU, PKB dan Khittah 1926*, (Jakarta: Kompas, 27 September 1999).

Shiddiq, Ahmad, *"Pemulihan Khittah NU"*. Makalah di sampaikan pada seminar Munas Alim Ulama Menjelang Muktamar ke-27 di Situbondo, di selenggarakan oleh PB Syuri'ah NU (Jakarta, 13 Desember, 1983).

Sudibyoy, Agus, *"Menelusuri Liberalisme Islam di NU"*, (Jakarta: Lakpesdam-TAF, edisi No. 9/2000).

Suharni, *Ulama dan Politik: Peran Ulama P.P. Al Munawwir dalam Kampanye PKB pada Pemilu 1999 di Yogyakarta*, skripsi.